



## Implementasi Kurikulum yang Tidak Sesuai: Tinjauan terhadap Permasalahan sistem manajemen Sekolah

Aatina Milladunka Rohmah<sup>1</sup>, Laeli Kinayatul Khasanah<sup>2</sup>

Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali<sup>1,2</sup>

[aatinamilladunkarohmah@gmail.com](mailto:aatinamilladunkarohmah@gmail.com)<sup>1</sup>, [laelikinayatulkhasanah@gmail.com](mailto:laelikinayatulkhasanah@gmail.com)

### Article History:

Submitted

Received

Revised

Accepted

17 Februari 2026

20 Maret 2026

19 April 2026

29 Mei 2026

### Abstract

Curriculum implementation in schools continues to face various challenges, particularly the mismatch between curriculum planning and classroom learning practices. This condition indicates managerial problems within the school management system, especially in the functions of *pengawasan* and curriculum evaluation. This article aims to examine in depth the issue of inappropriate curriculum implementation from the perspective of weak *pengawasan* and evaluation within school management. This study employs a qualitative approach using a literature review method by analyzing relevant journal articles, academic books, and research reports related to curriculum management and educational *pengawasan*. The findings reveal that learning *pengawasan* in many schools remains administrative in nature, inconsistent, and lacking systematic follow-up, causing it to fail as a mechanism for professional guidance and quality control. In addition, curriculum evaluation has not functioned as a reflective and diagnostic instrument but is often limited to fulfilling formal reporting requirements. As a result, problems in curriculum implementation tend to recur without systematic improvement. This study concludes that ineffective curriculum implementation reflects the weakness of school managerial systems in integrating *pengawasan* and evaluation. Therefore, strengthening structured, participatory, and sustainable *pengawasan* and evaluation is essential to ensure effective curriculum implementation and continuous improvement in educational quality.

**Keyword:** Curriculum, Management System, Supervision, Evaluation

## Abstrak

Implementasi kurikulum di sekolah masih menghadapi berbagai permasalahan yang ditandai oleh ketidaksesuaian antara perencanaan kurikulum dan praktik pembelajaran di kelas. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan manajerial dalam sistem pengelolaan sekolah, khususnya pada fungsi pengawasan dan evaluasi kurikulum. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam permasalahan implementasi kurikulum yang tidak sesuai ditinjau dari lemahnya fungsi pengawasan dan evaluasi dalam manajemen sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka terhadap artikel jurnal, buku akademik, dan laporan penelitian yang relevan dengan manajemen kurikulum dan pengawasan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengawasan pembelajaran di banyak sekolah masih bersifat administratif, tidak konsisten, dan minim tindak lanjut, sehingga gagal berfungsi sebagai mekanisme pengendali dan pembinaan profesional guru. Selain itu, evaluasi kurikulum belum difungsikan sebagai instrumen reflektif dan diagnostik, melainkan sebatas pemenuhan laporan formal. Akibatnya, persoalan implementasi kurikulum cenderung berulang tanpa perbaikan sistematis. Kajian ini menyimpulkan bahwa ketidaksesuaian implementasi kurikulum merupakan cerminan dari lemahnya sistem manajerial sekolah dalam mengintegrasikan pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan evaluasi yang terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan agar implementasi kurikulum dapat berjalan efektif dan mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** kurikulum, sistem manajemen, pengawasan, evaluasi.

## A. Pendahuluan

Implementasi kurikulum di sekolah masih menjadi persoalan serius dalam praktik pendidikan di Indonesia. Berbagai kebijakan kurikulum yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sering kali tidak terlaksana secara utuh dan konsisten di tingkat satuan pendidikan. Ketidaksesuaian antara perencanaan kurikulum dan pelaksanaannya di kelas menunjukkan adanya masalah mendasar dalam proses pengelolaan pendidikan di sekolah (T. Hasballah & Zulfatmi, 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa permasalahan implementasi kurikulum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegagalan kebijakan, melainkan sebagai indikasi lemahnya sistem manajerial sekolah dalam menerjemahkan kebijakan kedalam praktik nyata. Permasalahan tersebut tercermin dalam praktik pembelajaran yang masih berorientasi pada pemenuhan administrasi, rendahnya konsistensi penerapan pendekatan pembelajaran aktif, serta ketidak tercapaian capaian pembelajaran yang ditetapkan (Permatasari, 2024). Berbagai studi menunjukkan bahwa guru kerap mengalami kesulitan dalam menerapkan tuntutan kurikulum akibat keterbatasan sarana, beban kerja tinggi, serta kurangnya pendampingan berkelanjutan. Namun, apabila ditelaah lebih dalam, kondisi tersebut mencerminkan persoalan struktural di tingkat sekolah yang tidak mampu menciptakan iklim kerja dan sistem pendukung kondusif bagi implementasi kurikulum.

Di antara berbagai faktor penghambat, lemahnya fungsi pengawasan dan evaluasi dalam sistem manajerial sekolah menjadi titik krusial yang sering luput dari perhatian. Hal ini menyebabkan penyimpangan implementasi tidak teridentifikasi secara dini, sehingga masalah terus berulang tanpa penyelesaian sistematis (Wishal Luthfikha, 2023). Ketika sistem manajemen sekolah gagal beroperasi secara efektif, implementasi kurikulum cenderung berjalan tanpa arah jelas dan kehilangan konsistensi. Permasalahan manajerial tersebut semakin terasa ketika sekolah dihadapkan pada dinamika perubahan dan pembaruan kurikulum yang menuntut adaptasi tinggi dari seluruh pemangku kepentingan. Kurikulum modern yang menawarkan fleksibilitas lebih besar dan otonomi pengelolaan memang dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan lokal, namun justru memerlukan fondasi kapasitas sistem manajerial yang kokoh agar tidak memunculkan ketidakjelasan pelaksanaan (Gumilar,

2025). Tanpa sistem manajemen terstruktur yang mendukung transisi bertahap, perubahan tersebut berpotensi memperdalam jurang antara rancangan kebijakan ideal dengan praktik pembelajaran sehari-hari, sehingga mengurangi efektivitas reformasi pendidikan secara keseluruhan.

Dengan demikian, permasalahan implementasi kurikulum pada dasarnya berakar pada lemahnya sistem manajemen sekolah. Tidak adanya sinkronisasi antara kebijakan dan praktik pembelajaran merupakan konsekuensi dari tidak optimalnya sistem manajerial dalam mengelola dinamika implementasi kurikulum. Oleh karena itu, penguatan sistem manajerial sekolah menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan kurikulum berfungsi sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan, bukan sekadar dokumen kebijakan. Berdasarkan uraian tersebut, artikel berjudul “Implementasi Kurikulum yang Tidak Sesuai: Tinjauan terhadap Permasalahan Manajerial Sekolah” bertujuan untuk mengkaji secara mendalam permasalahan manajerial sekolah dalam implementasi kurikulum. Fokus kajian tertuju pada fungsi pengawasan dan evaluasi kurikulum dalam sistem manajemen sekolah, dengan argumen bahwa ketidaksesuaian implementasi kurikulum mencerminkan kelemahan mekanisme pengawasan dan evaluasi dalam menyinkronkan kebijakan dengan praktik pembelajaran kelas.

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan konseptual dan analitis terhadap permasalahan implementasi kurikulum yang tidak sesuai dalam sistem manajemen sekolah, khususnya pada fungsi pengawasan dan evaluasi, berdasarkan temuan-temuan penelitian terdahulu dan sumber ilmiah yang relevan. Subjek penelitian dalam kajian ini bukan individu atau lembaga secara langsung, melainkan dokumen ilmiah berupa artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, serta laporan penelitian yang membahas manajemen kurikulum, pengawasan pendidikan, dan evaluasi kurikulum sekolah.

Rancangan penelitian disusun secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mengorganisasikan temuan literatur ke dalam tema-tema utama yang selaras dengan fokus artikel, meliputi: implementasi kurikulum dalam sistem manajemen sekolah, lemahnya fungsi pengawasan, evaluasi kurikulum yang tidak fungsional, serta strategi penguatan pengawasan dan evaluasi (Bayu, 2023). Rancangan ini memungkinkan peneliti menelusuri pola permasalahan secara sistematis dan membangun argumentasi yang koheren antarbagian pembahasan. Instrumen penelitian yang digunakan berupa lembar analisis dokumen, yang berfungsi untuk mengidentifikasi informasi penting dari setiap sumber, seperti fokus kajian, konteks penelitian, temuan utama, serta implikasinya terhadap manajemen kurikulum sekolah (Eko, 2021). Instrumen ini membantu menjaga konsistensi analisis dan meminimalkan bias dalam proses penelaahan sumber.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan cara menelusuri dan mengumpulkan literatur dari basis data jurnal ilmiah, repositori perguruan tinggi, serta penerbit akademik. Data yang terkumpul kemudian diseleksi, diklasifikasikan, dan disusun sesuai dengan fokus kajian penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*), yakni dengan membaca secara mendalam setiap sumber, mengodekan tema-tema yang relevan, membandingkan temuan antarpengelitian, serta

mensintesisnya menjadi narasi analitis. Hasil analisis digunakan untuk mengungkap keterkaitan antara lemahnya fungsi pengawasan dan evaluasi dengan ketidaksesuaian implementasi kurikulum dalam sistem manajemen sekolah.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Untuk Implementasi Kurikulum dalam Sistem Manajemen Sekolah

Kurikulum sering disebut sebagai jantung pendidikan karena di sanalah arah, isi, dan capaian pembelajaran ditentukan. Melalui kurikulum, sekolah menetapkan apa yang harus dipelajari peserta didik, bagaimana proses pembelajaran dijalankan, serta kompetensi apa yang diharapkan terbentuk di akhir proses pendidikan. Secara normatif, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran, serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Namun, dalam praktik pendidikan sehari-hari, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana kurikulum benar-benar berfungsi sebagai pedoman hidup di sekolah, bukan sekadar dokumen formal (Permatasari, 2025). Pertanyaan tersebut membawa diskusi pada ranah manajerial. Implementasi kurikulum tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berkelindan dengan sistem manajemen sekolah yang mengelolanya. Dalam kajian manajemen pendidikan, pengelolaan kurikulum mencakup rangkaian proses yang sistematis, mulai dari perencanaan, penyusunan strategi implementasi, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan pembelajaran, hingga monitoring dan evaluasi. Seluruh tahapan ini harus terintegrasi agar kurikulum tidak berhenti sebagai produk administratif, tetapi benar-benar menjelma menjadi praktik pembelajaran yang bermakna di ruang kelas (Wirtati et al., 2025).

Sayangnya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa integrasi tersebut belum sepenuhnya terwujud di banyak sekolah. Realitas pendidikan di Indonesia memperlihatkan adanya kesenjangan antara desain kurikulum yang dirancang secara nasional dengan praktik implementasinya di tingkat sekolah. Studi pada sejumlah sekolah dasar mengungkap bahwa meskipun kurikulum telah ditetapkan baik KTSP maupun Kurikulum Merdeka pelaksanaannya masih cenderung terfokus pada pemenuhan dokumen perencanaan dan administrasi. Sementara itu, fungsi pengawasan dan evaluasi belum dijalankan secara sistemik dan berkelanjutan (Ismiatun et al., 2022). Kesenjangan tersebut semakin terlihat dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini secara konseptual memberikan ruang fleksibilitas bagi sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lokal. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa fleksibilitas ini belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan manajerial (Yanita et al., 2024).

Dalam perspektif manajemen berbasis sekolah, implementasi kurikulum seharusnya dipahami sebagai proses kolaboratif. Kepala sekolah, guru, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan kualitas pembelajaran. Studi kasus di SMP Islam Ma'arif menunjukkan bahwa ketika prinsip manajemen berbasis sekolah diterapkan secara partisipatif, kualitas implementasi

kurikulum cenderung meningkat. Hal ini terjadi karena keputusan pedagogis disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata dan karakteristik konteks sekolah (Winarsih, 2014). Namun, praktik ideal tersebut belum menjadi gambaran umum. Banyak sekolah masih menghadapi kendala dalam menerapkan fungsi manajemen secara konsisten, terutama pada tahap pengawasan. Penelitian pada satuan pendidikan anak usia dini menunjukkan bahwa aktivitas pengawasan terhadap implementasi kurikulum sering kali hanya dilakukan pada akhir tahun ajaran. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan belum optimal, sehingga kesinambungan antara perencanaan dan evaluasi menjadi lemah (Agistia et al., 2021).

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kurikulum sangat bergantung pada hubungan yang kuat antara sistem manajemen sekolah dan praktik pembelajaran guru. Kurikulum baru akan benar-benar “hidup” ketika diterjemahkan melalui strategi pembelajaran yang kontekstual dan berpusat pada peserta didik. Sebaliknya, jika manajemen sekolah hanya menekankan aspek perencanaan dan administrasi, proses pembelajaran di kelas berpotensi menjadi mekanis dan kehilangan substansi tujuan kurikulum (Mof, 2015). Di sinilah fungsi pengawasan dan evaluasi menjadi krusial. Tanpa pengawasan yang terstruktur dan evaluasi yang berkelanjutan, sekolah hanya memperoleh gambaran implementasi kurikulum dari laporan formal, bukan dari realitas pembelajaran yang berlangsung di kelas. Akibatnya, efektivitas strategi pembelajaran dan ketercapaian tujuan kurikulum sulit diukur secara akurat (Herawati & Supriyana, 2024).

Lebih jauh, evaluasi kurikulum seharusnya tidak direduksi menjadi penilaian hasil belajar semata. Evaluasi perlu mencakup analisis proses pembelajaran, relevansi kegiatan yang dilakukan, ketercapaian tujuan kurikulum, serta dampaknya terhadap budaya belajar di sekolah. Ketika evaluasi difungsikan sebagai umpan balik, ia dapat menjadi dasar penting bagi perbaikan perencanaan dan pengembangan kurikulum. Namun, praktik evaluasi semacam ini masih belum dijalankan secara konsisten di banyak satuan pendidikan (Herawati & Supriyana, 2024). Berbagai temuan tersebut menegaskan bahwa implementasi kurikulum merupakan fenomena manajerial yang kompleks. Keberhasilannya menuntut keseimbangan antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, serta pengembangan berkelanjutan. Literatur manajemen kurikulum menekankan bahwa kualitas implementasi sangat ditentukan oleh kemampuan sekolah dalam mengelola seluruh tahapan tersebut secara konsisten dan selaras dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan zaman (Permatasari, 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama dalam implementasi kurikulum di sekolah sering kali tidak terletak pada kelemahan desain kurikulum itu sendiri, melainkan pada lemahnya sistem manajemen sekolah dalam mengelola proses implementasi. Ketidak konsistenan pada fungsi pengawasan dan evaluasi menjadi faktor kunci yang menyebabkan kurikulum tidak tersampaikan secara optimal kepada peserta didik. Temuan ini menjadi pijakan penting untuk melanjutkan pembahasan pada sub-bab berikutnya yang secara khusus mengulas problematika pengawasan dan evaluasi dalam manajemen sistem sekolah.

## 2. Lemahnya Fungsi Pengawasan sebagai Akar Masalah Implementasi Kurikulum

Dalam sistem manajemen pendidikan, pengawasan berfungsi mengendalikan pelaksanaan tugas untuk memastikan bahwa rencana yang telah disusun dan dilaksanakan benar-benar selaras dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Tanpa kontrol yang efektif, perencanaan kurikulum yang matang dan pelaksanaan pembelajaran yang tampak aktif berpotensi menjadi rutinitas administratif tanpa makna substantif bagi peningkatan mutu pembelajaran di kelas. Dalam konteks sekolah, fungsi pengawasan seharusnya mencakup perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan pembelajaran, analisis hasil temuan, tindak lanjut hasil pengawasan, serta pemanfaatan data pengawasan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan (Nurrohmah et al., 2025). Namun dalam praktiknya, fungsi pengawasan di banyak sekolah belum dijalankan sesuai dengan esensi tersebut. Pengawasan pembelajaran sering kali direduksi menjadi kegiatan administratif yang bersifat formalitas. Pengawasan guru dilakukan sebatas bentuk pengisian ceklist kunjungan kelas atau pemeriksaan dokumen perangkat pembelajaran, tanpa diikuti dengan pemaknaan terhadap proses belajar mengajar yang berlangsung. Ketika temuan pengawasan tidak dianalisis dan tidak diterjemahkan menjadi rekomendasi perbaikan yang konkret, pengawasan kehilangan daya dorongnya. Kondisi ini membuat guru memandang pengawasan sebagai beban tambahan, bukan sebagai sarana pembelajaran profesional yang membantu mereka berkembang dalam praktik mengajar (Karamoy et al., 2025).

Situasi tersebut menjadi semakin problematis ketika pelaksanaan pengawasan dilakukan secara tidak konsisten dan tidak terjadwal. Pengawasan yang seharusnya bersifat berkelanjutan justru dilakukan secara sporadis, bergantung pada waktu luang atau situasi tertentu. Penelitian di Madrasah Aliyah menunjukkan bahwa kepala madrasah menghadapi kesulitan dalam menjaga kesinambungan pengawasan sepanjang tahun ajaran, terlebih dalam kondisi krisis seperti masa pandemi. Akibatnya, pengawasan tidak mampu membentuk siklus perbaikan pembelajaran yang berkelanjutan, melainkan hanya menjadi kegiatan insidental yang minim dampak pedagogis bagi guru (Deni et al., 2022). Ketidakkonsistenan pengawasan juga berpengaruh pada cara guru memaknai pengawasan itu sendiri. Berbagai studi menunjukkan bahwa persepsi guru terhadap pengawasan masih cenderung negatif karena pengawasan lebih sering dipahami sebagai evaluasi administratif daripada dialog reflektif tentang praktik pembelajaran. Ketika waktu pengawasan terbatas dan tidak diikuti tindak lanjut yang jelas, guru tidak merasakan manfaat langsung dari proses pengawasan terhadap peningkatan kompetensi dan kualitas pengajarnya. Dalam konteks ini, pengawasan gagal membangun hubungan profesional yang kolaboratif antara pengawas dan guru (Yasmini et al., 2025).

Kelemahan fungsi pengawasan semakin tampak jika ditinjau dari kompetensi pelaksana pengawasan itu sendiri. Kepala sekolah dan pengawas pendidikan tidak selalu memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan pengawasan akademik secara kontekstual. Penelitian di SMP Negeri 4 Air Sugihan menunjukkan bahwa kepala sekolah mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan pedagogis guru serta menyesuaikan pendekatan pengawasan dengan kondisi kelas yang beragam. Akibatnya, pengawasan berhenti pada observasi permukaan tanpa diikuti strategi pembinaan yang

mampu mendorong perbaikan nyata dalam pembelajaran (Suryani et al., 2024). Masalah pengawasan tidak berhenti pada tahap pengawasan, tetapi berlanjut pada pemanfaatan hasil pengawasan dalam pengambilan keputusan manajerial sekolah. Banyak institusi pendidikan belum menjadikan data hasil pengawasan sebagai bahan refleksi bersama dalam forum profesional seperti rapat guru atau musyawarah manajemen sekolah. Temuan pengawasan sering kali hanya tersimpan dalam dokumen laporan tanpa dibahas secara kritis dan tanpa memengaruhi kebijakan internal sekolah. Kondisi ini menyebabkan berbagai persoalan implementasi kurikulum tidak pernah diangkat ke permukaan untuk diselesaikan secara sistemik (Sarah et al., 2025).

Lemahnya pengawasan juga berdampak pada ketidakmampuan sekolah mendeteksi hambatan nyata dalam proses pembelajaran. Tanpa pengawasan yang mendalam dan dialogis, sekolah sulit mengidentifikasi kesenjangan pemahaman guru terhadap tujuan kurikulum, rendahnya partisipasi peserta didik, atau ketidaksesuaian metode pembelajaran dengan karakteristik siswa. Studi tentang implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar menunjukkan bahwa tantangan-tantangan tersebut sering luput dari perhatian karena pengawasan dilakukan secara satu arah, tanpa ruang refleksi dan tindak lanjut yang bermakna (Irmayanti et al., n.d.). Akar persoalan lainnya terletak pada tidak terbangunnya mekanisme yang menghubungkan hasil pengawasan dengan evaluasi kurikulum sekolah. Secara ideal, pengawasan harus berfungsi sebagai jembatan antara praktik pembelajaran di kelas dan proses evaluasi kurikulum di tingkat lembaga pendidikan. Evaluasi yang efektif seharusnya melibatkan analisis hasil pengawasan, umpan balik konstruktif bagi guru, serta rekomendasi strategis untuk pengembangan pembelajaran. Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa fungsi evaluasi ini sering dilakukan secara sporadis dan tidak terintegrasi dengan hasil pengawasan, sehingga kehilangan daya transformasinya (Nurrohmah et al., 2025).

Dampak kumulatif dari lemahnya pengawasan akhirnya terasa pada hasil pembelajaran. Sekolah yang tidak memiliki sistem pengawasan dan tindak lanjut yang kuat akan kesulitan membangun budaya belajar yang reflektif, adaptif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Pengawasan seharusnya menjadi mekanisme pembelajaran organisasi, di mana data pengajaran digunakan sebagai bahan refleksi kolektif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ketika fungsi ini tidak berjalan, sekolah akan kehilangan salah satu instrumen terpenting dalam menjaga kualitas implementasi kurikulum (Sembiring & Risamasu, 2024). Dengan demikian, lemahnya fungsi pengawasan dalam manajemen sekolah menjadi akar utama dari kegagalan implementasi kurikulum secara efektif. Ketika pengawasan yang gagal berfungsi sebagai pengendali dan pembelajaran organisasi, evaluasi kurikulum akan kehilangan landasan empiris yang kuat untuk perbaikan sistematis. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan agar evaluasi kurikulum dapat berjalan fungsional dan berkelanjutan.

### 3. Evaluasi Kurikulum yang Tidak Fungsional dalam Sistem Sekolah

Evaluasi implementasi kurikulum seharusnya diposisikan sebagai instrumen reflektif yang memungkinkan sekolah untuk dapat memahami kesenjangan secara komprehensif antara perencanaan kurikulum dan praktik pembelajaran di kelas. Evaluasi

tidak hanya berfungsi untuk menilai ketercapaian hasil belajar, tetapi juga untuk mengidentifikasi hambatan struktural, pedagogik, dan kontekstual yang memengaruhi efektivitas implementasi kurikulum. Dalam perspektif manajemen pendidikan, evaluasi yang bermakna adalah evaluasi yang mampu menghasilkan informasi diagnostik sebagai dasar pengambilan keputusan perbaikan secara berkelanjutan (Susilawati & Sugmawati, 2024).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi kurikulum belum diarahkan untuk menjawab persoalan mendasar dalam implementasi, seperti ketercapaian tujuan pembelajaran, kesesuaian strategi pembelajaran, dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik. Bukannya menjadi mekanisme refleksi kritis, evaluasi sering kali bersifat reaktif dan dilakukan setelah berbagai masalah terakumulasi tanpa tindak lanjut yang jelas. Akibatnya, persoalan implementasi kurikulum cenderung berulang dari tahun ke tahun, sementara sekolah tidak memiliki pijakan evaluatif yang kuat untuk melakukan perbaikan secara sistematis (Miftahudin et al., 2025). Permasalahan evaluasi yang tidak fungsional semakin tampak dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Meskipun kurikulum ini memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal, banyak satuan pendidikan belum mampu memanfaatkan ruang tersebut secara optimal. Evaluasi di tingkat sekolah sering gagal mengungkap rendahnya pemahaman guru terhadap kerangka kurikulum, ketidaksesuaian perencanaan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, serta lemahnya keterkaitan antara hasil evaluasi pembelajaran dan perbaikan strategi mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi belum berperan sebagai alat diagnosis yang mampu mengidentifikasi akar masalah implementasi kurikulum (Miftahudin et al., 2025).

Evaluasi kurikulum yang tidak fungsional tercermin pada lemahnya perhatian terhadap konteks pembelajaran. Penelitian di sekolah dasar menunjukkan bahwa perangkat kurikulum sering disusun secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan kondisi sosial sekolah. Evaluasi yang dilakukan pun lebih menitikberatkan pada kelengkapan dokumen, bukan pada kualitas proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Akibatnya, kesenjangan antara tujuan kurikulum dan praktik pembelajaran tidak teridentifikasi secara memadai, sehingga kurikulum terus dijalankan meskipun tidak sepenuhnya relevan dengan realitas sekolah (Susilawati & Sugmawati, 2024). Lebih jauh, evaluasi kurikulum yang tidak fungsional berpotensi membentuk budaya sekolah yang minim refleksi kritis. Ketika evaluasi dipahami sebagai kewajiban administratif yang harus “aman” dan tidak menimbulkan konsekuensi perubahan, sekolah cenderung menghindari pembacaan jujur terhadap kelemahan internalnya. Laporan evaluasi tampak positif di atas kertas, namun tidak mencerminkan kondisi pembelajaran yang sebenarnya (Miftahudin et al., 2025).

Pada akhirnya, evaluasi kurikulum yang tidak fungsional menegaskan lemahnya integrasi antara pengawasan, refleksi, dan juga pengambilan keputusan dalam sistem manajemen sekolah. Evaluasi seharusnya menjadi dasar bagi pembaruan kurikulum, pengembangan kompetensi guru, dan perbaikan strategi pembelajaran. Namun, ketika hasil evaluasi tidak dimanfaatkan sebagai rujukan kebijakan internal sekolah, kurikulum

kehilangan daya transformasinya. Dengan demikian, kegagalan evaluasi kurikulum bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan dari sistem manajerial sekolah yang belum mampu menjadikan evaluasi sebagai instrumen perubahan yang bermakna (Miftahudin et al., 2025).

#### 4. Strategi Penguatan Pengawasan dan Evaluasi untuk Implementasi Kurikulum Berkelanjutan

Penguatan fungsi pengawasan dan evaluasi dalam implementasi kurikulum perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem manajemen sekolah yang terstruktur, bukan sekadar aktivitas pengawasan yang bersifat insidental. Dalam kajian manajemen pendidikan, pengawasan berfungsi memastikan keterpaduan antara perencanaan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan capaian hasil belajar melalui mekanisme pemantauan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terukur (Mulyasa, 2022). Penguatan evaluasi implementasi kurikulum merupakan komponen penting lain dalam sistem manajemen sekolah yang berfungsi sebagai sarana refleksi dan pembelajaran organisasi. Evaluasi yang efektif tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pelaksanaan, hambatan struktural, serta kesesuaian kurikulum dengan konteks dan kebutuhan sekolah (Stufflebeam & Coryn, 2014).

Selain itu, evaluasi implementasi kurikulum perlu dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sekolah, seperti kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Melalui evaluasi yang komprehensif, sekolah dapat mengidentifikasi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan kurikulum, sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang realistis dan kontekstual. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan efektivitas pengelolaan kurikulum di sekolah (Gumilar & Permatasari, 2023). Secara konseptual, pengawasan dan evaluasi merupakan dua fungsi manajerial yang saling melengkapi dalam menjamin keberlanjutan implementasi kurikulum. Pengawasan berperan memastikan keterlaksanaan kurikulum sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, sedangkan evaluasi berfungsi sebagai mekanisme reflektif untuk menilai proses, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan perbaikan yang diperlukan. Namun, ketika pengawasan dan evaluasi masih dijalankan secara terpisah, bersifat administratif, dan minim keterlibatan peran guru, keduanya belum mampu berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan mutu pembelajaran.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada keberadaan aktivitas pengawasan dan evaluasi, melainkan pada lemahnya integrasi keduanya dalam sistem manajemen sekolah yang berorientasi pada pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan pengawasan dan evaluasi yang dirancang secara sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan, agar keduanya dapat berfungsi sebagai instrumen pengendali sekaligus pendorong perbaikan implementasi kurikulum. Pembahasan mengenai strategi-strategi tersebut menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana pengelolaan kurikulum dapat diarahkan secara lebih adaptif dan

berkelanjutan. Strategi Penguatan Pengawasan dan Evaluasi Pembelajaran menurut (Deni et al., 2022) :

- a. Peningkatan Perencanaan Pengawasan Akademik  
Penguatan pengawasan pembelajaran perlu diawali dengan perencanaan pengawasan akademik yang sistematis dan terjadwal. Pemangku kebijakan perlu menyusun program pengawasan yang memuat tujuan yang jelas, indikator penilaian, serta fokus pengamatan yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran. Perencanaan yang baik akan mengarahkan pengawasan agar tidak sekadar menjadi kegiatan formal, melainkan berfungsi sebagai instrumen pembinaan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru dalam proses pembelajaran.
- b. Penguatan Pelaksanaan Pengawasan Secara Langsung  
Pelaksanaan pengawasan akademik akan lebih efektif apabila dilakukan melalui pengamatan langsung di kelas. Ketergantungan pada instrumen tidak langsung, seperti kuesioner atau wawancara daring melalui Google Form, perlu dikurangi karena tidak mampu menggambarkan kondisi pembelajaran secara utuh. Observasi langsung memungkinkan kepala madrasah menilai secara nyata penerapan metode pembelajaran, penggunaan media, pengelolaan kelas, serta pemanfaatan waktu belajar oleh tenaga pendidik.
- c. Penggunaan Variasi Teknik Pengawasan  
Agar pengawasan pembelajaran berjalan lebih humanis dan tidak bersifat kaku, selaku pemangku kebijakan perlu menerapkan variasi teknik pengawasan. Teknik tersebut dapat berupa observasi kelas, diskusi individu, pengawasan kelompok, maupun kegiatan refleksi bersama. Variasi teknik ini membantu menciptakan suasana pengawasan yang bersifat pendampingan, sehingga guru merasa didukung untuk berkembang, bukan sekadar dinilai.
- d. Penguatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan  
Hasil pengawasan akademik perlu ditindaklanjuti secara konkret dan terarah. Tindak lanjut dapat dilakukan melalui pembahasan bersama yang difokuskan pada aspek-aspek pembelajaran yang perlu diperbaiki, seperti pemilihan metode pembelajaran, penggunaan media, teknik penilaian, serta pengelolaan waktu pembelajaran. Dengan adanya tindak lanjut yang jelas, pengawasan berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi guru untuk meningkatkan kualitas praktik mengajarnya sesuai dengan standar dan juga target pembelajaran kurikulum.
- e. Pengembangan Kompetensi Pimpinan  
Keberhasilan pengawasan dan evaluasi pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kompetensi pimpinan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, mereka perlu secara berkelanjutan meningkatkan kapasitas profesional melalui pelatihan, forum ilmiah, maupun pemanfaatan berbagai sumber belajar. Peningkatan kompetensi ini memungkinkan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dilakukan secara lebih profesional, objektif, dan berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran.
- f. Evaluasi Berkelanjutan terhadap Pelaksanaan Pengawasan  
Pengawasan pembelajaran yang telah dilaksanakan perlu dievaluasi secara berkala untuk menilai tingkat efektivitasnya. Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa

pengawasan benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan profesional guru, bukan sekadar memenuhi tuntutan administratif. Melalui evaluasi yang berkelanjutan, sistem pengawasan pembelajaran dapat terus disempurnakan agar selaras dengan kebutuhan sekolah dan dinamika pembelajaran.

Sedangkan menurut (Athallah et al., 2025) Strategi penguatan pengawasan dan evaluasi kurikulum dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Instrumen Evaluasi yang Komprehensif
- b. Pelibatan Multi-Pemangku Kepentingan
- c. Monitoring Berkelanjutan dan Transparan
- d. Integrasi Nilai Keberlanjutan dalam Evaluasi
- e. Sinergi Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum

Berdasarkan berbagai pendekatan yang membahas penguatan pengawasan dan evaluasi pembelajaran serta kurikulum, terlihat bahwa upaya peningkatan mutu implementasi kurikulum menuntut keterpaduan antara praktik pengawasan di tingkat sekolah dan sistem evaluasi yang bersifat lebih luas dan berkelanjutan. Pengawasan pembelajaran yang dilakukan secara langsung, terencana, dan berorientasi pada pendampingan guru memiliki peran penting dalam memastikan kesesuaian antara perencanaan kurikulum dan praktik pembelajaran di kelas. Pendekatan ini memungkinkan sekolah memperoleh gambaran nyata tentang proses pembelajaran sekaligus memberikan umpan balik yang relevan bagi peningkatan profesionalisme guru.

Di sisi lain, penguatan evaluasi kurikulum menuntut pengembangan instrumen yang komprehensif, pelibatan berbagai pemangku kepentingan, serta pemanfaatan sistem monitoring yang berkelanjutan dan transparan. Evaluasi yang demikian tidak hanya menilai ketercapaian hasil belajar, tetapi juga memastikan relevansi kurikulum dengan tuntutan abad ke-21 dan prinsip pendidikan berkelanjutan. Dalam pandangan penulis, penguatan pengawasan dan evaluasi akan lebih efektif apabila kedua pendekatan tersebut dipadukan secara sinergis. Pengawasan pembelajaran yang bersifat reflektif menjadi fondasi operasional di tingkat sekolah, sementara evaluasi kurikulum yang partisipatif dan sistemik berfungsi sebagai kerangka pengembangan jangka panjang. Sinergi ini memungkinkan hasil pengawasan dan evaluasi tidak berhenti pada perbaikan teknis pembelajaran, tetapi mendorong pembaruan kurikulum secara adaptif dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika kebutuhan pendidikan.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil kajian pustaka dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam implementasi kurikulum di sekolah tidak terletak pada kelemahan desain kebijakan kurikulum, melainkan pada lemahnya sistem manajerial sekolah dalam mengelola proses implementasi tersebut. Ketidaksesuaian antara perencanaan kurikulum dan praktik pembelajaran di kelas menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan evaluasi belum dijalankan secara optimal, konsisten, dan berkelanjutan. Pengawasan pembelajaran yang cenderung bersifat administratif, tidak terjadwal, serta minim tindak lanjut

menyebabkan sekolah gagal mendeteksi dan memperbaiki penyimpangan implementasi kurikulum secara dini.

Selain itu, evaluasi kurikulum yang tidak fungsional memperlihatkan lemahnya integrasi antara hasil pengawasan, refleksi pembelajaran, dan pengambilan keputusan manajerial sekolah. Evaluasi lebih banyak difokuskan pada pemenuhan dokumen dan pelaporan formal, sehingga belum mampu berperan sebagai instrumen diagnostik untuk perbaikan pembelajaran dan pengembangan kurikulum secara adaptif. Kondisi ini berdampak pada berulangnya masalah implementasi kurikulum tanpa solusi sistematis.

Temuan kajian ini menegaskan bahwa penguatan fungsi pengawasan dan evaluasi perlu diposisikan sebagai inti dari manajemen kurikulum sekolah. Pengawasan yang bersifat reflektif dan partisipatif, serta evaluasi yang terintegrasi dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, merupakan kunci agar kurikulum dapat berfungsi sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian, pengembangan sistem manajerial sekolah yang mampu mensinergikan pengawasan dan evaluasi menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi kurikulum yang kontekstual, adaptif, dan berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

- Agistia, N. A., Danugiri, D., & Hidayat, D. (2021). Implementasi Manajemen Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini. *DIKLUS: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 2(September), 114–127.
- Athallah, S. A., Putriani, S. D., Ani, T. R., Setiawati, M., & Utama, H. B. (2025). Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum : Kunci Keberhasilan Pendidikan Berkelanjutan Curriculum Evaluation and Development : The Key to Success in Continuing Education. *JICC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 10435–10441.
- Deni, S., Saepurahman, A., & Erihadiana, M. (2022). Implementasi Manajemen Pengawasan dan Evaluasi Pendidikan pada Masa Pandemi COVID-19. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(6).
- Herawati, E. S. B., & Supriyana, H. (2024). Implementasi fungsi manajemen dalam tata kelola kurikulum di sekolah. *ASWAJA*, 5, 12–23.
- Irmayanti, R. W., Marmoah, S., & Sriyanto, M. I. (n.d.). Implementasi kurikulum merdeka pada sekolah penggerak dalam perspektif fungsi manajemen di sekolah dasar. 449.
- Ismiatun, S. R., Neliwati, & Ginting, B. S. (2022). Implementasi Manajemen Kurikulum di Sekolah Dasar Siti. *JURNAL BASICEDU*, 6(1), 965–969.
- Karamoy, C., Lumapow, H. R., & Pangkey, R. D. H. (2025). Implementation of Academic Pengawasanon in Elementary School. *Abdurrauf Science and Society*, 1(4), 902–912. <https://doi.org/10.70742/asoc.v1i4.352>
- Miftahudin, M. F., Nufus, N. T., & Hilaliyah, T. (2025). Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Praktik Pembelajaran Sekolah di Indonesia. *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial*, 3.
- Mof, Y. (2015). MANAJEMEN IMPLEMENTASI KURIKULUM. *TARBIYAH ISLAMIAH*, 5, 119–132.
- Mulyasa, H. E. (2022). Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah. Bumi Aksara.
- Nurrohmah, K., Suryana, S., & Saprialman. (2025). IMPLEMENTASI MANAJEMEN KURIKULUM DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SMP IT MENTARI ILMU. *Jurnal Manajemen Dan Inovasi*, 6(2), 559–572.

- Sarah, S., Ilyas, M., & Rizki, S. (2025). Implementation Strategy of Collaborative Academic Pengawasanon of High School Principals in Pidie Regency. *Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian*, 6(2), 948–955.
- Sembiring, D. A. K., & Risamasu, P. E. G. (2024). The Quality of Implementation of Academic Pengawasanon in Vocational Secondary Schools in Teaching Factory Based Learning. *Journal of Educational Learning and Innovation*, 4(1), 95–107. <https://doi.org/10.46229/elia.V4i1>
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). *Evaluation theory, models, and applications*. John Wiley & Sons.
- Sucipto, Muhammad Sukri, Yuyun Elizabeth Patras, L. N. (20 C.E.). Tantangan implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Literature Review. *Andrew’s Disease of the Skin Clinical Dermatology.*, 12(3).
- Suryani, Ahmad, S., & Puspita, Y. (2024). Implementation of Curriculum Management To Improve Teacher ’ s Performance. *Journal of Social Work and Science Education*, 5(2), 771–784.
- Susilawati, A., & Sugmawati, D. (2024). Evaluasi Implementasi Kurikulum Pendidikan di Sekolah Dasar di Bima dan Dompu : Tinjauan terhadap Perangkat Pembelajaran. *DIKSI: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Sosial*, 5, 76–83.
- T. Hasballah, & Zulfatmi. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka: Tantangan, Kebijakan, Dan Dampak Terhadap Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 10(2), 312–322. <https://doi.org/10.37567/jie.v10i2.3404>
- Winarsih, T. Y. (2014). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pengembangan Kurikulum SMP Islam Ma ’ arif 02 Malang. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 2(19), 107–113.
- Wirtati, I., Nasution, R. H., & Siregar, M. F. Z. (2025). Curriculum Management as a Foundation for Effective Schools. *Journal of Education And Technology*, 8(2), 285–298.
- Wishal Luthfikha, D. W. (2023). MANAJEMEN PENGELOLAAN KURIKULUM SEBAGAI STRATEGI PENCAPAIAN VISI SEKOLAH DI SD PLUS QURROTA A’YUN PURWAKARTA Wishal. *ADIBA: JOURNAL OF EDUCATION*, 3(2), 206–211. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.2977>
- Yanita, E. P., Nisa, Z. L., Sari, D. P., R, M. A. N., & Luthfiyyah, N. (2024). Implementasi Manajemen Pendidikan dalam Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran ( JTPP )*, 01(04), 788–793.
- Yasmini, Y., Tamsiati, E., Marlina, L., & Febriyanti. (2025). Implementation of Academic Pengawasanon and its Impact on the Performance of Islamic Education Teachers at MIN 1 Musi Banyuasin. *International Journal of Education and Literature*, 4, 92–103.